

Pelindo 3 Sub Regional Kalimantan Dukung Kepolisian Republik Indonesia Gelar Bakti Sosial



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/386244/pelindo-3-sub-regional-kalimantan-dukung-polri-gelar-bakti-sosial>

Banjarmasin (ANTARA) - Pelindo Sub Regional 3 Kalimantan, bersinergi mendukung menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial Polri, yang di laksanakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) bersama Polresta Banjarmasin di Pelabuhan Terminal Penumpang Trisakti Bandarmasih.

Pada keterangan tertulis Pelindo Sub Regional 3 Kalimantan, di Banjarmasin, Jumat, disampaikan bakti sosial berupa pembagian bantuan sosial, pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pasar murah itu, di pimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Djajadi.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo Martosumito, CEO Pelindo Sub Regional 3 Kalimantan Fariz Hariyoso Forkopimda Kalsel dan Forkopimda Kota Banjarmasin.

Andi Rian, menyampaikan, pelaksanaan pasar murah itu, diharapkan dapat mengintervensi laju inflasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kalsel, khususnya pada tingkat masyarakat dapat terus membaik.

Lebih lanjut, Andi Rian berkeinginan program bakti sosial tersebut, dapat terlaksana secara rutin di seluruh kabupaten atau kota di wilayah provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, CEO Pelindo Sub Regional 3 Kalimantan, pada kegiatan itu berkesempatan menyerahkan secara langsung bantuan paket sembako sebanyak 500 paket, kepada masyarakat di sekitar pelabuhan.

Tak lupa Fariz Hariyoso, juga memberikan apresiasi atas kegiatan yang berlangsung, dan pihaknya pun siap untuk mendukung kegiatan pembagian bantuan sosial Polda Kalsel beserta jajarannya.

"Bahwa Pelindo sebagai BUMN akan terus berkolaborasi dengan seluruh elemen pemerintah serta masyarakat untuk terus meningkatkan laju perkonomian demi kesejahteraan masyarakat Indonesia". Ujar Fariz

Sementara itu, untuk pelaksanaan pameran UMKM pada kegiatan bakti sosial itu, di ikuti sebanyak 64 stand UMKM, yang terdiri dari stand kuliner khas Kota Banjarmasin dan stand berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau.

Pada kegiatan Pasar Murah itu, Polresta Banjarmasin berkolaborasi dengan Pemkot Banjarmasin mendistribusikan 1500 paket sembako.

Pada Bakti Sosial yang berlangsung pada Kamis (7/9) tersebut, sebanyak 50 orang pekerja informal seperti Buruh, Tukang, Petugas Kebersihan, Tukang Becak, Ojek Pangkalan dan Marbot atau Kaum Mesjid yang berkegiatan di sekitaran Pelabuhan, juga diberikan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/386244/pelindo-3-sub-regional-kalimantan-dukung-polri-gelar-bakti-sosial>, 8 September 2023.
2. <https://seputaran.id/bersama-polda-kalsel-pelindo-sub-regional-3-kalimantan-gelar-pembagian-bantuan-sosial-pasar-kurah-dan-pameran-umkm/>, 8 September 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.